

IMPLEMENTASI PROGRAM PENINGKATAN KOMPETENSI PEMBELAJARAN (PKP) BERBASIS ZONASI UNTUK GURU PADA JENJANG SMP

MARGA PURNAMA
SMP Negeri 202 Jakarta
E-mail : margapurnama87@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan fungsi manajerial implementasi Program Peningkatan Kompetensi Pembelajaran (PKP) Berbasis Zonasi pada jenjang SMP di DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis melalui teknik studi kepustakaan atau penelusuran literatur. Berdasarkan hasil kajian, diperoleh simpulan, bahwa: (1) Program PKP Berbasis Zonasi bertujuan untuk meningkatkan kompetensi peserta didik melalui pembinaan guru dalam merencanakan, melaksanakan, sampai dengan mengevaluasi pembelajaran yang berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi (*Higher Order Thinking Skills/HOTS*); (2) Program PKP Berbasis Zonasi dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek kewilayahan atau zonasi; dan (3) Program PKP Berbasis Zonasi dalam pelaksanaannya harus memenuhi prinsip taat azas, berbasis kompetensi, terstandar, Profesional, transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Harapannya, guru yang profesional sangat diperlukan dan akan mampu melahirkan golongan cendekiawan masa depan Indonesia.

Kata Kunci: PKB, PKP, Berbasis Zonasi, Guru, SMP

PENDAHULUAN

Pendidikan yang berkualitas erat kaitannya dengan kurikulum. Kurikulum dinilai memiliki peran penting dalam menentukan arah pelaksanaan pendidikan di Indonesia, sebab didalam kurikulum mengandung tujuan, perumusan rencana proses pembelajaran, serta penilaian-penilaian yang dilakukan untuk mengetahui keberhasilan pendidikan itu sendiri. Kurikulum diartikan sebagai sistem yang terencana dalam mengatur isi dan bahan pengajaran sebagai pedoman dalam kegiatan pembelajaran. Dalam pelaksanaannya kurikulum senantiasa mengalami perkembangan dalam memenuhi fungsi-fungsinya yaitu fungsi penyesuaian, integrasi, diferensiasi, persiapan, pemilihan, dan diagnostik. Di Indonesia telah tercatat sebanyak sepuluh kali perkembangan kurikulum dan saat ini menerapkan kurikulum 2013.

Pengembangan kurikulum dilakukan dalam menyelesaikan permasalahan permasalahan pendidikan akibat adanya perubahan dalam masyarakat. Menurut Direktorat Menengah Umum Depdiknas (dalam Kunandar, 2007: 17) penyempurnaan pendidikan menitikberatkan pada: 1). Pelaksanaan otonomi pengelolaan pendidikan; 2). Pelaksanaan wajib belajar sembilan tahun; 3). Pengembangan dan pelaksanaan kurikulum yang menekankan pada kompetensi; 4). Penyelenggaraan sistem pendidikan yang terbuka; 5). Peningkatan profesionalisme tenaga kependidikan; 6). Penyediaan sarana belajar yang memadai; 7). Pembiayaan pendidikan yang berkeadilan; 8). Pemberdayaan peran masyarakat; 9). Pengawasan, evaluasi dan akreditasi pendidikan.

Berdasarkan kajian yang telah disampaikan tersebut, salah satu masalah yang menjadi sorotan saat ini yaitu pengembangan dan pelaksanaan kurikulum yang menekankan pada kompetensi. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang mengarahkan pengembangan kurikulum pada pendidikan abad 21 meliputi keterampilan abad 21, penggunaan pendekatan saintifik, dan penerapan penilaian autentik. Adanya kebijakan tersebut menuntut guru untuk melaksanakan pembelajaran berlandaskan keterampilan abad 21 yang biasa disebut 4C (*Critical thinking and problem solving, Creative and innovation, Collaboration, and Communication*). Setiap aspek pada keterampilan abad 21 berkaitan dengan pemenuhan kecakapan hidup, karena sejatinya setiap manusia harus dapat menjadi manusia seutuhnya (sikap) serta hidup sejahtera (pengetahuan dan keterampilan).

Pendidikan sebagai proses dapat dilakukan untuk memperoleh kecakapan hidup dan memenuhi kompetensi-kompetensi tertentu sesuai dengan tuntutan jaman saat ini, salah satunya keterampilan berpikir (Zubaidah, 2010). Keterampilan berpikir khususnya berpikir tingkat tinggi (kritis) dapat berguna untuk menyiapkan diri menghadapi tantangan dan memecahkan masalah sehingga pada akhirnya siap menjalani kehidupan nyata. Implementasi pendidikan saat ini dilakukan untuk mempersiapkan peserta didik dalam tiga hal, terdiri atas 1) mempersiapkan peserta didik agar dapat menyelesaikan masalah bahkan untuk masalah yang akan dihadapi kedepannya, 2) mempersiapkan peserta didik agar dapat memiliki kompetensi dalam melakukan pekerjaan yang tuntutannya masih terus berkembang, dan 3) mempersiapkan anak peserta didik dapat memanfaatkan perkembangan teknologi (Fadel dalam Fitriyah, 2019). Dengan demikian, keterampilan berpikir tingkat tinggi merupakan patokan sumber daya manusia yang unggul dan kompeten yaitu mampu berhadapan dengan transformasi (sosial, budaya, ekonomi, politik) serta menempatkan diri searah dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Namun, sayang sekali sampai saat ini pendidikan di Indonesia dinilai belum memenuhi kualitasnya. Terdapat fenomena yang menunjukkan bahwa peserta didik masih lemah dalam keterampilan berpikir tingkat tinggi, diantaranya yaitu terkait munculnya hasil nilai ujian nasional (UN) yang dinilai tidak memuaskan. Ujian Nasional (UN) merupakan sistem evaluasi dengan standar pendidikan nasional, sejak tahun 2016 Kemendikbud telah memberlakukan soal UN yang menuntut peserta didik untuk berpikir tingkat tinggi atau *high order thinking skill* (HOTS). Oleh sebab itu, sudah seharusnya peserta didik dibiasakan dengan soal-soal yang menuntut untuk berpikir tingkat tinggi (*high order thinking skill*) atau HOTS. Hal itu dapat dilakukan jika guru dapat melakukan perannya dengan baik, maka guru harus senantiasa dibina dalam mengimplementasikan kurikulum. Dalam pembelajaran peran guru menjadi sangat penting dalam mencerdaskan peserta didik melalui pembelajaran berorientasi HOTS. Guru merupakan kunci utama keberhasilan pembelajaran di sekolah sudah semestinya meningkatkan profesionalitasnya dan diarahkan untuk memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dan tantangan saat ini. Sesuai dengan amanah Undang-undang RI No.14 Tahun 2005 mengenai pembinaan serta pengembangan profesi guru yang merupakan implementasi profesi pendidik melalui program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB). Dirjen GTK (2019: 3) mengemukakan bahwa “Program PKB dahulu dikembangkan oleh Dirjen GTK didasarkan pada hasil Uji Kompetensi Guru (UKG) untuk meningkatkan kompetensi guru pada ranah pedagogik dan professional”. Guru juga dapat diajak untuk berpartisipasi dalam kegiatan diklat dan workshop yang berkaitan dengan pengembangan proses pembelajaran (Fitriyah, 2019).

Menurut Dudung (2014: 21) dalam penelitiannya, hasil Program PKB (Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan) yang dilaksanakan bagi guru-guru di Jakarta Timur yaitu “Memiliki kemampuan untuk membuat dan menulis sebuah karya ilmiah, jurnal, makalah, dan proposal penelitian tindakan kelas.” Dari penelitian tersebut menggambarkan bahwa guru-guru yang mengikuti program PKB dapat meningkatkan keterampilan menulisnya sebagai bahan untuk mempersiapkan kenaikan pangkatnya. Tetapi, tercantum dalam rekomendasi menjelaskan perlu adanya bimbingan berkelanjutan dengan bentuk pembingkian terstruktur. Guru-guru memerlukan pembinaan dalam mengembangkan keterampilannya serta memecahkan permasalahan yang dialaminya.

Tercatat juga dalam penelitian yang dilakukan oleh Zainnudin mengenai pelaksanaan program PKB (Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan) terhadap peningkatan kemampuan penguasaan materi guru yaitu terjadi peningkatan jika PKB diimplementasikan berkelanjutan. Hasil yang didapatkan setelah melakukan 2 siklus ditunjukkan sebagai berikut: (1). Pra siklus dengan nilai 70,79/Kurang; (2) Siklus 1 dengan nilai 78,36 /Cukup; dan (3) Siklus 2 dengan nilai 83,86/Baik (Zainnudin, 2018: 48). Walau dinilai sudah cukup baik, penelitian yang telah dilakukan merekomendasikan bahwa perlunya pemenuhan mutu pendidikan serta senantiasa belajar dalam mengembangkan diri sesuai dengan tuntutan kualitas.

Program PKP sebagai lanjutan dan bagian dari PKB dinilai penting untuk mendukung pelaksanaan peningkatan kompetensi guru dalam rangka mengejar pemerataan dan perkembangan mutu pendidikan. Program PKP berbasis zonasi mengedepankan keunikan kualitas pendidikan di sekolah seperti akreditasi, nilai UKG, dan hasil belajar (Dirjen GTK, 2019). Selain itu, guru yang terlibat dalam kelompok kerjanya masing-masing akan lebih mudah berkoordinasi dan melaksanakan PKP, melakukan evaluasi internal sampai pada pelaporan. Gagasan ini juga pada akhirnya akan dapat menunjukkan permasalahan daerah masing-masing, mencari dan berbagi solusi tepat sasaran.

Pelaksanaan program PKP terdiri dari dua kegiatan yaitu IN (*In service*) dan ON (*On Training*). Dalam sebuah pendidikan dan pelatihan kegiatan IN sama dengan istilah pembelajaran dan ON diartikan sama dengan evaluasi pembelajaran. Pada kegiatan IN guru difasilitasi untuk memahami secara keseluruhan mengenai kebijakan dan materi yang disampaikan, sedangkan pada kegiatan ON guru melakukan dua kegiatan evaluasi yaitu pembuatan Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan praktik pembelajaran. Kegiatan dalam menilai hasil program mengacu pada standar isi dan proses pembelajaran kurikulum 2013. Manfaat program PKP berbasis zonasi yaitu (1) guru senantiasa menerapkan pembelajaran yang mengarah pada pembelajaran berorientasi keterampilan berpikir tingkat tinggi, yang dilaksanakan melalui perencanaan, pelaksanaan sampai pada penilaian, (2) peserta didik dapat meningkatkan kompetensinya dalam berpikir tingkat tinggi, (3) menjadi arahan pelaksanaan supervisi akademik bagi para pemangku kebijakan sekolah, dan (4) menjadi pedoman bagi pengawas sekolah untuk melaksanakan supervisi akademik dan manajerial yang ada di sekolah (Dirjen GTK, 2019).

Adapun, kemampuan berpikir tingkat tinggi dapat dikembangkan dengan memperhatikan materi dan strategi pembelajaran yang tepat. Peran guru sebagai fasilitator lebih diutamakan dalam menstimulasi peserta didik dalam keterampilan berpikir kritis, khususnya untuk menghasilkan gagasan dan ide. Seperti pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, guru dan peserta didik biasanya dihadapkan pada sebuah informasi tertentu (fakta) agar dapat memahami berbagai fenomena untuk membuat suatu kesimpulan, sebab informasi akan menjadi pengetahuan setelah dilakukan analisa, diterapkan, atau diintegrasikan dalam kehidupan seperti mengambil suatu keputusan atau memecahkan masalah. Suwandi (2018) mengemukakan bahwa guru-guru masih belum memberikan pelayanan pembelajaran yang seharusnya didapatkan oleh peserta didik, diyakini bahwa sebagian besar pengalaman belajar dan latihan yang diberikan guru kurang dapat meningkatkan keterampilan peserta didik dalam menyimak, membaca, menulis dan berbicara, padahal keempat hal tersebut merupakan keterampilan dasar dalam berpikir tingkat tinggi yang banyak dipelajari melalui pembelajaran Bahasa Indonesia. Sebuah tantangan bagi guru mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk mampu mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Oleh karena itu, guru perlu mengikuti diklat yang mengutamakan pengembangan kompetensi pedagogik guru yakni memahami karakteristik peserta didik, memiliki dan menerapkan konsep pembelajaran berorientasi keterampilan berpikir tingkat tinggi.

Dengan diarahkannya Program PKP berbasis zonasi berorientasi HOTS pada kebutuhan dan permasalahan saat ini, maka sudah seharusnya program ini diharapkan dapat terlaksana dengan efektif dan efisien serta dapat memberikan dampak nyata terhadap pendidikan di Indonesia. Orientasi hasil dapat terlihat dari nilai-nilai yang dihasilkan dalam persaingan dengan negara-negara asing pada tahun berikutnya melalui PISA, sedangkan dalam jangka dekat yaitu berkembangnya kompetensi guru dalam merancang pembelajaran HOTS serta hasil belajar peserta didik di kelas.

Untuk program Peningkatan Kompetensi Pembelajaran berbasis zonasi pada mata pelajaran Bahasa Indonesia di DKI Jakarta terdapat 13 pusat belajar (zonasi) yang masing-masing pusat belajar diikuti oleh 10-20 orang guru. Pada setiap pusat belajar terdapat juga satu orang fasilitator atau yang biasa disebut Guru Inti/GI, dipilih berdasarkan kualitas dan kompetensinya sebagai guru yaitu memiliki skor Ujian Kompetensi Guru/UKG lebih dari 75

dan modul yang baik (KCM<=2). Adanya pembagian dan pengelolaan seperti itu akan memudahkan penyelenggaraan program PKP berbasis zonasi. Dengan demikian, program PKP berbasis zonasi berorientasi HOTS dinilai sebagai gagasan baru dalam pelatihan guru, maka peneliti tertarik untuk melihat gambaran dan informasi mengenai implementasi program PKP berbasis zonasi. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, peneliti bermaksud melihat bagaimana perencanaan, pelaksanaan, evaluasi serta faktor pendukung dan faktor penghambat program Peningkatan Kompetensi Pembelajaran berbasis zonasi. Sehingga, peneliti membuat penelitian dengan judul “Implementasi Program Peningkatan Kompetensi Pembelajaran Berbasis Zonasi Guru Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Sekolah Menengah Pertama DKI Jakarta”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode deskriptif analisis. Oleh karena itu, kajiannya terbatas pada bahasan suatu materi secara teoritis, tidak dipaparkan sebuah hasil penelitian berupa survei yang olahan datanya berupa angka-angka (kuantitatif). Oleh karena itu, teknik penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan atau penelusuran literatur. Metode Penelitian yang dilakukan adalah dengan mengumpulkan data berupa informasi melalui dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, foto, maupun dokumen elektronik yang dapat mendukung proses penulisan.

Menurut Sugiyono (2012:291) studi kepustakaan berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti. Adapun pustaka utama yang dicermati dalam penelitian ini, yaitu: (1) Petunjuk Teknis Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) Melalui Peningkatan Kompetensi Pembelajaran (PKP) Berbasis Zonasi (Dirjen GTK Kemendikbud, 2019), (2) Panduan Diklat Calon Tim Penilai Jabfung Guru (Kemendiknas, 2010), (3) Pedoman Kegiatan PKB dan Angka Kreditnya (Kemendiknas, 2010), (4) Pedoman Pengelolaan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) (Kemendiknas, 2010), (5) Pedoman Penilaian PKB (Kemendiknas, 2010), dan (6) Penilaian Kinerja Guru (Kemendiknas, 2010). Selain itu, akan digunakan secara dialektik dari sumber kepustakaan pendukung lainnya.

Adapun sasaran Program PKP Berbasis Zonasi adalah seluruh guru di Sekolah Menengah Pertama (SMP) khususnya Guru Sasaran yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Untuk pelaksanaan kegiatan mengacu pada langkah-langkah pelaksanaan praktek yang telah disusun. Adapun susunan kegiatannya sebagai berikut:

Pertemuan	Materi Diklat	Durasi	Media	Kegiatan Pembelajaran	Sumber Belajar	Produk Peserta	
						LK	Tagihan
In-1	1) Kebijakan PKP 2) PPK dan GLN berorientasi HOTS 3) Pengenalan kelas pendamping online 4) Pengembangan pembelajaran HOTS	4jp	LK	Diskusi Diskusi Diskusi Diskusi	Portal SIM PKB Modul		
In-2	1) Analisis unit pembelajaran 2) Desain Pembelajaran 3) Penyusunan soal HOTS		PPT LK	Diskusi	Portal SIM PKB Modul	LK-1	
In-3	1) Tinjauan desain pembelajaran dan penilaian HOTS 2) Perbaikan hasil tinjauan pembelajaran dan		PPT LK		Portal SIM PKB Modul		

penilaian HOTS							
In-4	1) Refleksi peraktik pembelajaran dan penilaian di sekolah 2) Desain pembelajaran dan penilaian Berorientasi ke-2		PPT LK		Portal SIM PKB Modul		
In-5	1) Laporan Best Practice				Portal SIM PKB Modul		

Adapun cara pelaksanaan kegiatan yang digunakan dalam pembelajaran program PKP ini adalah *Andragogi*, yaitu proses untuk melibatkan peserta didik dewasa ke dalam suatu struktur pengalaman belajar. Lokasi kegiatan dilakukan di dua lokasi yaitu (1) **Pertama**, bertempat di SMP Negeri 195 Duren Sawit Jln. Sawah Barat No. 48 Kode Pos 13440 Kec. Duren Sawit, Kab. Jakarta Timur, Prov. DKI Jakarta, untuk kegiatan IN, (2) **Kedua**, bertempat di SMP Negeri 202 Jakarta, Jln.Buluh Perindu IV / I, Pondok Bambu, Kab. Jakarta Timur, Prov. DKI Jakarta. Kode Pos 13430, untuk kegiatan ON.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desain Perencanaan PKP Berbasis Zonasi

PKP Berbasis zonasi pada dasarnya bagian dari pelaksanaan program PKB. Program PKB merupakan kunci untuk mengoptimalkan kesempatan pengembangan karir baik saat ini maupun kedepan. Untuk itu, PKB harus mendorong dan mendukung perubahan khususnya di dalam praktik-praktik dan pengembangan karir guru. Pada prinsipnya, PKB secara manajerial mencakup kegiatan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan refleksi yang didesain untuk meningkatkan karakteristik, pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan (*diadopsi dari Center for Continuous Professional Development (CPD)*). Dengan perencanaan dan refleksi pada pengalaman belajar guru dan/atau praktisi pendidikan akan mempercepat pengembangan pengetahuan dan keterampilan guru serta kemajuan karir guru dan/atau praktisi pendidikan.

PKB adalah bagian penting dari proses pengembangan keprofesionalan guru. PKB tidak terjadi secara *ad-hoc* tetapi dilakukan melalui pendekatan yang diawali dengan perencanaan untuk mencapai standar kompetensi profesi (khususnya bagi guru yang belum mencapai standar kompetensi sesuai dengan hasil penilaian kinerja, atau dengan kata lain berkinerja rendah), mempertahankan/menjaga dan mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan perolehan pengetahuan dan keterampilan baru. PKB dalam rangka pengembangan pengetahuandan keterampilan merupakan tanggung-jawab guru secara individusesuai dengan masyarakat pembelajar, jadi sangat penting bagi guru yang berada diujung paling depan pendidikan.

Program PKB melalui PKP Berbasis Zonasi selanjutnya akan disingkat dengan Program PKP, merupakan program yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi peserta didik melalui pembinaan guru dalam merencanakan, melaksanakan, sampai dengan mengevaluasi pembelajaran yang berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi (*HigherOrder Thinking Skills/HOTS*). Program ini merupakan salah satu program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan yang lebih berfokus pada upaya memintarkan peserta didik melalui pembelajaran berorientasiketerampilan berpikir tingkat tinggi. Dengan mempertimbangkan pendekatan kewilayahann, atau dikenal dengan istilah zonasi, maka program ini dilakukan dengan berbasis zonasi, selanjutnya disebut dengan Program PKP. Program ini berfokus pada peningkatan kompetensi guru khususnya kompetensi pedagogi dan profesional. Sedangkan program PKP lebih berfokus pada upaya mencerdaskan peserta didik melalui pembelajaran berorientasi keterampilan berpikir tingkat tinggi.

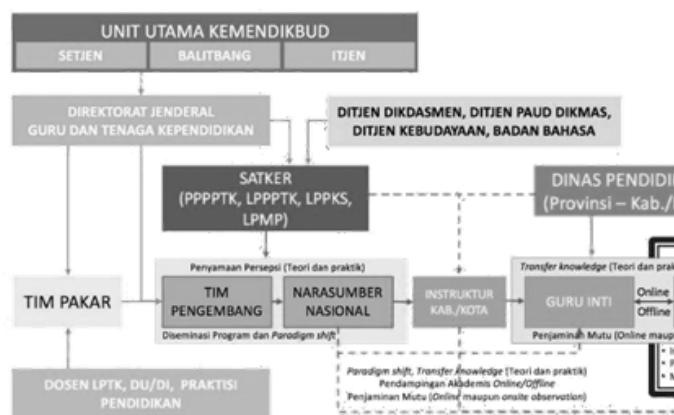
dapat dipahami bahwa penyiapan program PKP yang mempertimbangkan pendekatan kewilayahann, atau dikenal dengan istilah zonasi, dilaksanakan oleh Ditjen GTK mulai dari penyusunan Pedoman Program PKP, Petunjuk Teknis Program PKP, Buku Pegangan

Pembekalan Narasumber Nasional/Instruktur/Guru Inti Program PKP, Unit Pembelajaran, soal tes awal, dan tes akhir serta instrumen penjaminan mutu. Menurut Dirjen GTK (2019:8) zona Peningkatan Kompetensi Pembelajaran (PKP) pada hakikatnya merupakan bagian dari strategi percepatan pembangunan pendidikan yang merata, berkualitas, dan berkeadilan (Integrasi Pembangunan), melalui pengelolaan PKG, MGMP, MGBK, dan MGTIK yang selama ini dilakukan melalui Gugus atau Rayon. Zona PKP terintegrasi secara vertikal dari Satuan Pendidikan, Kabupaten/DKI, Provinsi, dan Pusat sesuai dengan kewenangan masing-masing, yang berkesinambungan dari Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, sampai Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus.

Adapun Program PKP yang dikembangkan oleh Ditjen GTK harus memenuhi prinsip sebagai berikut. **Pertama**, Taat Azas, program dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, baik yang diselenggarakan di pusat, provinsi maupun di kabupaten/DKI. **Kedua**, Berbasis Kompetensi, program merupakan upaya Pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan dan oleh karenanya program ini berpedoman pada standar isi, kompetensi inti dan kompetensi dasar, standar proses, dan standar penilaian pada Kurikulum 2013. **Ketiga**, Terstandar, pengelolaan program harus memenuhi standar yang ditetapkan meliputi standar pengelolaan, standar fasilitator, standar sarana dan prasarana, standar penilaian, standar penilaian, standar penyelenggaraan, standar waktu pelaksanaan, dan standar sertifikat. **Keempat**, Profesional, hasil UKG guru TK, SD, SLB, SMP, SMA, dan SMK dan hasil UKK guru kejuruan digunakan dalam analisis kebutuhan peningkatan kompetensi di masing-masing kelompok kerja. **Kelima**, Transparan, proses perencanaan dan pelaksanaan mulai dari persiapan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan dilakukan secara terbuka dan transparan serta dapat diketahui semua pihak yang berkepentingan. **Keenam**, Akuntabel, proses dan hasil Program dapat dipertanggungjawabkan kepada pemangku kepentingan pendidikan secara administratif, finansial, dan akademik. Kredibilitas dari pelaksanaan proses dan hasil program dapat dipercaya semua pihak. **Ketujuh**, Berkeadilan, semua guru pada setiap sekolah diharapkan akan mengikuti Program PKB melalui PKP. Untuk mensukseskan penyelenggaraan Program PKP serta pertimbangan akan adanya keterbatasan dana di Pusat, maka diharapkan Pemerintah Daerah dapat membantu dan berkontribusi dalam mengalokasikan dana melalui APBD sehingga kekurangan tersebut dapat diatasi.

Desain Pengorganisasian PKP Berbasis Zonasi

Pelaksanaan Program PKP Berbasis Zonasi dirancang dalam bentuk pelatihan berjenjang mulai dari Pembekalan Narasumber Nasional, Instruktur Nasional, dan Guru Inti seperti yang digambarkan pada alur berikut.



Gambar 1. Bagan Organisasi Penyelenggara Program PKP

Sumber: Dirjen GTK Kemendikbud (2019:11).

Program PKP Berbasis Zonasi merupakan kegiatan yang dikoordinasikan oleh Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan melibatkan UPT, Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/DKI, asosiasi profesi guru serta komunitas Guru dan Tenaga

Kependidikan (GTK). Kemudian dapat dijelaskan bahwa penyelenggaraan Program PKP menggunakan sekolah yang dijadikan sebagai tempat kegiatan. Tempat kegiatan ini digunakan untuk kegiatan pembelajaran tatap muka (*In*). Selain titik pusat zona yang terdapat pada laman Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan.

Tempat kegiatan juga dapat menggunakan sekolah lain di wilayah zonasi sesuai dengan kesepakatan GI dengan peserta, yang memenuhi standar prasarana sebagai berikut: (a) ruang kelas yang mampu menampung 20 orang peserta, (b) memiliki daya listrik yang mencukupi; dan (c) memiliki laboratorium komputer dan atau jaringan internet yang memadai. Kemudian pada pelaksanaannya, program PKP mempertimbangkan pendekatan kewilayahan, atau dikenal dengan istilah zonasi. Titik-titik pusat zonasi dapat diakses melalui laman <http://zonasi.data.kemdikbud.go.id/>. Pada program PKP, konsep zonasi disebut dengan istilah zona peningkatan kompetensi pembelajaran.



Gambar 2. Mekanisme Pengelolaan Zona PKP

Sumber: Dirjen GTK Kemendikbud (2019).

Mekanisme pengelolaan zona peningkatan kompetensi pembelajaran dilakukan melalui tahapan yang digambarkan pada Bagan 2, dapat dijelaskan sebagai berikut: (a) Penentuan zona prioritas pelaksanaan Program PKP dilakukan berdasarkan analisis kebutuhan sekolah. (b) Menetapkan rombongan belajar (rombel) Program PKP berdasarkan radius terdekat dengan sekolah yang akan dijadikan tempat kegiatan Program PKP yang berada di zona yang telah ditentukan. Khusus untuk mapel yang jumlah gurunya sedikit (SMA, SMK, SLB) maka dimungkinkan untuk membuat rombel yang anggotanya berasal dari beberapa zona. (c) Melakukan analisis jumlah guru sesuai bidang tugas yang diampu di masing-masing zona rombel. (d) Menetapkan PKG, KKG, MGMP, MGBK, dan MGTIK berdasarkan jumlah keanggotaan pada rentang 10-20 orang per kelompok. (e) Melakukan analisis kebutuhan guru inti untuk masing-masing zona. (f) Melakukan analisis kebutuhan dan waktu pelaksanaan pembekalan guru inti oleh masing-masing UPT sesuai jumlah guru inti di masing-masing zona.

Program PKP Berbasis Zonasi adalah kegiatan proses pembelajaran dan peningkatan kompetensi guru melalui pembinaan guru dalam merencanakan, melaksanakan, sampai dengan mengevaluasi pembelajaran yang berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi peserta didik. Pelaksanaan Program PKP Berbasis Zonasi dilakukan secara tatap muka dengan pola *In-On-In*, dimana kegiatan pembelajarannya dilakukan sebagian secara tatap muka dan sebagian dilakukan secara mandiri. Kegiatan *In-Service Learning (In)* adalah pembelajaran melalui kegiatan tatap muka antara peserta dengan GI sebagai fasilitator. Kegiatan *On-the-Job Learning (On)* merupakan kelanjutan proses pembelajaran dari kegiatan *In*. Pada saat *On* peserta melakukan pendalaman materi dan mengerjakan tugas-tugas yang diberikan pada saat *In*. Selama kegiatan *On*, peserta akan memperoleh pendampingan secara online dari fasilitator (NS/IP/IK) dan guru inti, yang difasilitasi melalui kelas pendampingan *online*.

Desain Pelaksanaan PKP Berbasis Zonasi

Program PKP Berbasis Zonasi adalah bagian penting dari proses pengembangan keprofesionalan guru. Program tersebut tidak terjadi secara *ad-hoc* tetapi dilakukan melalui pendekatan yang diawali dengan perencanaan untuk mencapai standar kompetensi profesi (khususnya bagi guru yang belum mencapai standar kompetensi sesuai dengan hasil penilaian kinerja, atau dengan kata lain berkinerja rendah), mempertahankan/menjaga dan mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan perolehan pengetahuan dan keterampilan baru. Program PKP Berbasis Zonasi dalam rangka pengembangan pengetahuan dan keterampilan merupakan tanggung-jawab guru secara individu sesuai dengan masyarakat pembelajar, jadi sangat penting bagi guru yang berada di ujung paling depan pendidikan. Oleh karena itu, agar Program PKP Berbasis Zonasi dapat mendukung kebutuhan individu dan meningkatkan praktik-praktik keprofesionalan maka kegiatan Program PKP Berbasis Zonasi harus: (a) Menjamin kedalaman pengetahuan terkait dengan materi ajar yang diampu. (b) Menyajikan landasan yang kuat tentang metodologi pembelajaran (pedagogik) untuk mata pelajaran tertentu. (c) Menyediakan pengetahuan yang lebih umum tentang proses pembelajaran dan sekolah sebagai institusi di samping pengetahuan terkait dengan materi ajar yang diampu dan metodologi pembelajaran (pedagogik) untuk mata pelajaran tertentu. (d) Mengakar dan merefleksikan penelitian terbaik yang ada dalam bidang pendidikan. (e) Berkontribusi terhadap pengukuran peningkatan keberhasilan peserta didik dalam belajarnya. (f) Membuat guru secara intelektual terhubung dengan ide-ide dan sumberdaya yang ada. (g) Menyediakan waktu yang cukup, dukungan dan sumberdaya bagi guru agar mampu menguasai isi materi belajarnya dan pedagogi serta mengintegrasikan dalam praktik-praktik pembelajaran sehari-hari. (h) Didesain oleh perwakilan dari mereka-mereka yang akan berpartisipasi dalam kegiatan PKB bekerjasama dengan para ahli dalam bidangnya. (i) Mencakup berbagai bentuk kegiatan termasuk beberapa kegiatan yang mungkin belum terpikirkan sebelumnya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan saat itu.

Secara teknis, pada pelaksanaannya, kegiatan Program PKP Berbasis Zonasi di dalam sekolah dilakukan oleh guru sendiri, melalui beberapa kegiatan: (1) mengembangkan kurikulum yang mencakup topik-topik aktual/terkini yang berkaitan dengan sains dan teknologi, sosial, dsb, sesuai dengan kebutuhan peserta didik; (2) merencanakan dan melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik; (3) mengevaluasi, menilai dan menganalisis hasil belajar peserta didik yang dapat menggambarkan kemampuan peserta didik sesungguhnya; (4) menganalisis dan mengembangkan model pembelajaran berdasarkan umpan balik yang diperoleh dari peserta didik terhadap pembelajarannya; (5) menulis kegiatan pembelajaran yang dilakukan sehari-hari sebagai bahan untuk melakukan refleksi dan pengembangan pembelajaran; (6) membaca dan mengkaji artikel dan/atau buku yang berkaitan dengan bidang dan profesi untuk membantu pengembangan pembelajaran; dan (7) melakukan penelitian mandiri (misalnya Penelitian Tindakan Kelas) dan menuliskan hasil penelitian tersebut.

Selanjutnya, program Program PKP Berbasis Zonasi bisa juga dilakukan oleh guru bekerja sama dengan guru lain dalam satu sekolah, antara lain melalui: (1) saling mengobservasi dan memberikan saran untuk perbaikan pembelajaran; (2) melakukan identifikasi, investigasi dan membahas permasalahan yang dihadapi di kelas/sekolah; (3) menulis modul, buku panduan peserta didik, Lembar Kerja Peserta didik, dsb; (4) membaca dan mengkaji artikel dan/atau buku yang berkaitan dengan bidang dan profesi untuk membantu pengembangan pembelajaran; (5) mengembangkan kurikulum dan persiapan mengajar dengan menggunakan TIK; (6) pelaksanaan pembimbingan pada program induksi.

Kemudian, sumber Program PKP Berbasis Zonasi dilaksanakan melalui kerjasama antarsekolah baik dalam satu rayon (gugus), antar rayon dalam kabupaten/DKI tertentu, antarprovinsi bahkan dimungkinkan melalui jaringan kerjasama sekolah antarnegara secara langsung maupun melalui teknologi informasi (sumber PKB jaringan sekolah). Kegiatan Program PKP Berbasis Zonasi dilakukan oleh sekolah melalui jaringan yang ada dapat

berupa: (1) kegiatan KKG/MGMP; (2) pelatihan/seminar/lokakarya sehari atau lebih; (3) kunjungan ke sekolah lain, dunia usaha dan industri, dsb; (4) mengundang nara sumber dari sekolah lain, komite sekolah, dinas pendidikan, pengawas, asosiasi profesi, atau dari instansi lain yang relevan. Jika kebutuhan guru dalam rangka pengembangan ke profesionalannya belum terpenuhi melalui kedua sumber dalam sekolah maupun jaringan sekolah, atau masih membutuhkan pengembangan lebih lanjut, maka dapat menggunakan sumber-sumber kepakaran.

Terakhir, pelaksanaan Program PKP Berbasis Zonasi berdasarkan sumber kepakaran lain ini dapat disediakan melalui kegiatan di LPMP, P4TK, Perguruan Tinggi atau institusi layanan lain yang diakui oleh pemerintah ataupun melalui pendidikan dan pelatihan jarak jauh melalui jejaring virtual atau TIK yang diselenggarakan oleh institusi layanan luar negeri. Proses Program PKP Berbasis Zonasi dimungkinkan menjadi lebih efektif dan efisien bila dilakukan di sekolah sendiri atau dilakukan bersama-sama dengan sekolah lain yang berdekatan (misalnya melalui KKG atau MGMP). Kegiatan Program PKP Berbasis Zonasi dapat dilakukan di luar lingkungan sekolah, misalnya oleh LPMP, Dinas Pendidikan, PT/LPTK atau penyedia jasa lainnya hanya untuk memenuhi kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi oleh sekolah sendiri.

Waktu pelaksanaan Program PKP Berbasis Zonasi dilakukan kurang lebih selama 1 bulan, di mana setiap pelaksanaan *In* (*In-1* s.d. *In-5*) dilakukan selama 2 hari, dan setiap pelaksanaan *On* (*On-1* s.d. *On-3*) dilakukan selama 5 hari, dengan asumsi 2JP/hari, seperti struktur pembelajaran pada tabel berikut:

Tabel 2. Contoh Pengaturan Waktu Pelaksanaan PKP Berbasis Zonasi

Minggu ke-	Waktu Pelaksanaan						
	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Minggu
1							1 <i>In-1</i> 2
2	3	4	5	6	7	8 <i>In-2</i> 9	
3	10	11	On-1	13	14	15 <i>In-3</i> 16	
4	17	18	On-2	20	21	22 <i>In-4</i> 23	
5	24	25	On-3	27	28	29 <i>In-5</i> 30	

Sumber: Dirjen GTK Kemendikbud (2019:18)

Adapun Program PKP Berbasis Zonasi dilaksanakan dengan pola pembelajaran *In-On-In*, melalui rincian kegiatan sebagai berikut: (a) Pelaksanaan *In* (*in service learning*), Pada kegiatan *In*, peserta dan guru inti akan melakukan pertemuan tatap muka di sekolah atau tempat lain yang telah ditetapkan. Selama kegiatan ini, partisipasi dan sikap peserta selama kegiatan berlangsung dinilai oleh guru inti sebagai salah satu unsur penilaian kegiatan peningkatan kompetensi pembelajaran berbasis zonasi. Hasil yang diharapkan selama kegiatan *In* disesuaikan dengan materi yang disampaikan, baik teori maupun praktik, serta tagihan yang harus dikerjakan oleh peserta. (b) Pelaksanaan *On* (*on the job learning*), Peserta *On* adalah guru yang telah mengikuti kegiatan *In-1* dan *In-2*. Setiap kegiatan *On* dilakukan di sekolah masing-masing peserta selama lebih kurang 1 minggu atau setara dengan 10 JP (asumsi 2JP/hari). Selama kegiatan *On*, peserta mendapatkan supervisi dari pengawas sekolah. Hasil yang diharapkan selama kegiatan *On* disesuaikan dengan praktik yang harus dilakukan peserta, serta tagihan yang harus dikerjakan melalui pendampingan akademis selama kegiatan berlangsung. Pendampingan akademis Program PKP Berbasis Zonasi terdiri dari 3 pola pendampingan: (1) Pola Pendampingan Akademis Tatap Muka, (2) Pola Pendampingan Akademis Full Online, dan (3) Pola Pendampingan Akademis *Blended*.

Selanjutnya berkaitan dengan sistem pengolahan data yang digunakan untuk mengelola pelaksanaan Program PKP Berbasis Zonasi adalah SIMPKB. Ruang lingkup dari SIMPKB terdiri dari: (1) Pengelolaan kelas pembekalan NS/IK/GI dan kelas PKP Berbasis Zonasi bagi guru sasaran, (2) Pengelolaan data peserta, fasilitator, dan kelompok kerja, (3) Pengelolaan pelaporan pelaksanaan PKP, meliputi rekapitulasi penilaian pembelajaran (nilai sikap, ketrampilan, tes awal, tes akhir, dan nilai akhir) dan laporan pertanggungjawaban banpem, (4) Penerbitan surat keterangan bagi guru inti yang telah bertugas sebagai fasilitator dalam Program PKP, (5) Penerbitan sertifikat Program PKP bagi guru sasaran.

Selanjutnya dapat dijelaskan bahwa Sistem manajemen pembelajaran atau *Learning Management System* (LMS) yang digunakan pada program PKP adalah *Moodle 3.6*. Sistem ini dikembangkan sebagai kelas pendampingan online bagi guru inti dan guru sasaran. Proses pendampingan online akan dilakukan oleh fasilitator (NS/IK) dengan tujuan untuk memastikan proses pembelajaran berjalan sesuai dengan yang telah dirancang. Kelas pendampingan *online* dikembangkan dengan mengikuti pola pembelajaran yang telah ditetapkan, hal ini untuk memudahkan peserta dalam melakukan pembelajaran. Selain itu, kelas ini digunakan sebagai wadah untuk mengunggah setiap laporan kegiatan, baik laporan administratif (daftar hadir, jurnal mengajar, dan rekapitulasi penilaian), maupun laporan akademis (tagihan peserta).

Desain Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan PKP Berbasis Zonasi

Pada Program PKP Berbasis Zonasi, komponen yang dinilai meliputi proses kegiatan pelatihan dan produk atau hasil belajar: *Pertama*, Penilaian Sikap, komponen penilaian sikap kegiatan dilakukan untuk mengetahui partisipasi dan sikap peserta pada aspek kerjasama, disiplin, tanggungjawab, dan keaktifan saat menerima materi, melaksanakan tugas individu dan kelompok, mengemukakan pendapat dan bertanya jawab, serta saat berinteraksi dengan fasilitator dan peserta lain. *Kedua*, Penilaian Keterampilan, penilaian keterampilan dimaksudkan untuk mengetahui kemampuan peserta dalam mendemonstrasikan pemahaman dan penerapan pengetahuan yang diperoleh, serta keterampilan yang mendukung kompetensi dan indikator. *Ketiga*, Tes Akhir, pada akhir Program PKP, peserta akan mengikuti tes akhir secara online di Sekolah Inti (TUK). Tes akhir terdiri dari 45 soal pilihan ganda dengan 4 pilihan jawaban yang meliputi kompetensi pedagogik dan profesional dengan komposisi 70:30. Adapun kegiatan monitoring dan evaluasi Program PKP Berbasis Zonasi perlu dilakukan sebagai bagian dari penjaminan mutu program secara menyeluruh. Laporan hasil monitoring dan evaluasi program merupakan bahan masukan kepada pihak yang berkepentingan. Hasil evaluasi program ini akan digunakan sebagai bahan kebijakan pimpinan, perbaikan, dan pengembangan.

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi (*monev*) pada program PKP Berbasis Zonasi dilakukan terhadap komponen akademis dan administratif. Mekanisme pelaksanaannya dapat dijelaskan sebagai berikut. (1) Komponen Akademis, pada komponen akademis, *monev* dilakukan sebagai sarana penjaminan mutu terhadap proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru sasaran selama kegiatan berlangsung. Penjaminan mutu terhadap proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru sasaran bersama peserta didik di dalam kelas, dilakukan oleh Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan LPMP dengan skema tahapan sebagai berikut. Adapun penjaminan mutu yang dilakukan oleh Direktorat atau UPT pada komponen ini bersifat sampling. (2) Komponen Administratif, pada komponen administratif, *monev* dilakukan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan kegiatan telah sesuai dengan standar penyelenggaraan yang diatur pada Pedoman Program PKP yang meliputi standar pengelolaan, standar fasilitator, standar sarana dan prasarana, standar penilaian, standar penyelenggara, dan standar waktu pelaksanaan.

Pada akhir pelaksanaan program PKP, masing-masing UPT diwajibkan membuat laporan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan. Laporan dibuat pada akhir kegiatan untuk kemudian diserahkan kepada Ditjen GTK. Laporan meliputi hasil pelaksanaan kegiatan yang dilengkapi dengan dokumen pelaksanaan kegiatan dan dokumen

pertanggungjawaban keuangan. Laporan kegiatan diharapkan dapat menunjukkan efektivitas dan relevansi terhadap peningkatan kualitas guru.

KESIMPULAN

Berdasarkan paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa program PKP Berbasis Zonasi bertujuan untuk meningkatkan kompetensi peserta didik melalui pembinaan guru dalam merencanakan, melaksanakan, sampai dengan mengevaluasi pembelajaran yang berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi (*Higher Order Thinking Skills/HOTS*). Program tersebut merupakan salah satu program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) yang lebih berfokus pada upaya meningkatkan kompetensi peserta didik melalui pembelajaran berorientasi keterampilan berpikir tingkat tinggi. Dengan mempertimbangkan pendekatan kewilayahan, atau dikenal dengan istilah zonasi, maka program ini dilakukan dengan berbasis zonasi, selanjutnya disebut dengan Program PKP Berbasis Zonasi.

Pada pelaksanaannya, Program PKP Berbasis Zonasi meliputi fungsi manajerial perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi. Adapun pada pelaksanaannya, harus memenuhi prinsip *taat azas, berbasis kompetensi, terstandar, profesional, transparan, akuntabel*, dan *berkeadilan*. Harapannya, guru akan terampil membangkitkan minat peserta didik kepada ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memiliki integritas kepribadian yang tangguh untuk mampu berkompetitif di abad 21. Guru-guru yang profesional sangat diperlukan dan akan mampu melahirkan golongan cendekiawan masa depan Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, M. (2014). *Memahami Riset Perilaku dan Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.

Arman, A. 2016. Upaya Peningkatan Kompetensi Guru dalam Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran melalui Supervisi Akademik Kepala Sekolah di SMAN 1 Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 1 (1), 55-62.

Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. (2019). Pedoman Pelaksanaan Program Peningkatan Kompetensi Pembelajaran Berbasis Zonasi. Jakarta: Dirjen GTK.

Djaali dan Muljono. (2007). *Pengukuran dalam Bidang Pendidikan*. Jakarta: Universitas Negeri Jakarta.

Dudung, A. (2014). Pelatihan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) Bagi Guru-Guru Se-Jakarta Timur. *Sarwahita*, 11(1), 13-21. DOI: <https://doi.org/10.21009/sarwahita.111.03>.

Fitriyah, R. N. (2019). Pengembangan Kompetensi Guru Di Era Revolusi Industri 4.0 Melalui Pendidikan Dan Pelatihan. Prosiding SENDI-U 2019. 359-364.

Hardiyanto, 2019. *Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) Melalui Peningkatan Kompetensi Pembelajaran (PKP) Berbasis Zonasi Mata Pelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga, Dan Kesehatan (Pjok) Sekolah Dasar (SD) Permainan Kasti*, Jakarta. Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Dasar Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Hermawan, I. (2019). *Metodologi Penelitian Pendidikan (Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed Method)*. Kuningan: Hidayatul Qur'an Kuningan.

Kunandar. (2007). *Guru Profesional Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Persiapan Menghadapi Sertifikasi Guru*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

Mahmud. (2011). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia

Sudjana, N. (2012). *Standar Kompetensi Pengawas Dimensi dan Indikator*. Jakarta: Binamitra Publishing.

Sugiyono. (2017). *Statistika untuk Penelitian*. Jakarta: Alfabeta.

Tyagita, B. P. A., & Iriani, A. (2018). Strategi Peningkatan Kompetensi Pedagogik Guru Untuk Meningkatkan Mutu Sekolah. *Kelola: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 5(2), 165-176.

Werner, Jon M., dan DeSimone, Randy L. (2009). *Human Resources Development, 5th Edition*. South-Western Cengage Learning, Mason.

Winaryati, E. (2018). Penilaian Kompetensi Peserta didik abad 21. In Prosiding Seminar Nasional & Internasional. 1(1). 6-19.

Zainnudin, Z. (2018). Peningkatan Kemampuan Menguasai Materi Pembelajaran melalui Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) Guru Kelas di UPTD Makmur Kabupaten Bireuen. *Jurnal Serambi Ilmu*, 19(1), 34-49. DOI:<https://doi.org/10.32672/si. v19i1.1015>.

Zubaidah, S. (2010). Berpikir Kritis: Kemampuan Berpikir Tingkat Tinggi yang Dapat Dikembangkan melalui Pembelajaran Sains. In Makalah *Seminar Nasional Sains dengan Tema Optimalisasi Sains untuk memberdayakan Manusia*. Pascasarjana Unesa (Vol. 16)